

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan Dana desa berbasis nilai budaya lokal huyula dan faktor penentu implementasi kebijakan publik sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa berbasis nilai budaya lokal huyula, dimana budaya lokal huyula membantu dalam mengefektifkan kebijakan pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan nilai-nilai budaya huyula yakni nilai kerjasama, nilai kebersamaan, nilai tanggungjawab, nilai musyawarah, nilai persatuan dan peduli dalam asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, tertib dan disiplin yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Faktor penentu implementasi kebijakan publik berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Lemito bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, faktor kepemimpinan, dan faktor budaya membantu dalam mengefektifkan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lemito.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka peneliti memberikan beberapa saran penting dalam pengelolaan Dana desa yakni:

1. Pemerintah desa dalam mengimplementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penting menjaga nilai-nilai yang sudah ada. Pemerintah desa sebaiknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tata kelola anggaran desa tidak hanya melakukan transparansi dalam bentuk baliho akan tetapi melalui media sosial maupun media cetak dan tidak hanya menampilkan total anggaran akan tetapi rincian anggaran disampaikan.
2. Bagi pemerintah Kecamatan Lemito sebaiknya lebih melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam hal pembangunan desa dilihat dari transparansi, akuntabel, partisipatif masyarakat, tertib dan disiplin pemerintah desa dalam hal tata kelola keuangan desa agar bisa terjaga demi mengefektifkan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadji, Yuliyanto, (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Keban, Yeremias. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Koentjaraningrat, (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad, F. *et.al.* (2005). *Menggagas Masa Depan Gorontalo*. Yogyakarta: HPMIG Press.
- Neuman, Lawrence, (2000), *Social research methods, qualitative and quantitative approaches*, Fourth edition
- Nugroho, Riant (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang; model-model, perumusan, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, (2007), *Administrasi Publik*, Jakarta. Gramedia.
- (2016), *Teori Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Pandji. (2013). *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, A.G. (2008). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Solichin, Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan; Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , (2012), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Malang: Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- , (2013), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Syaukani HR, Gaffar Afan, Rasyid Riyas, (2005), *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan

Tahir, Arifin (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Penelitian

Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.

Deviyanti, D. (2013). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380-394.

Domili, S. (2017). BUDAYA HUYULA DALAM PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMP NEGERI WONOSARI KABUPATEN BOALEMO). *Jurnal Pascasarjana*, 2(1).

Dzikrillah, A.B., & Ansori, A. (2018). PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN PKK DI DESA CIHANJUANG. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 1(3), 7-13.

Hayati, R., Nisa, K., & Sirait, S. (2018). PENYULUHAN KEPEMIMPINAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DI DESA ANTARA. *JURDIMAS ROYAL*, 1(2), 9-14.

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).

- Marzali, A. (2014). Pergeseran Orientasi Nilai Kultural dan Keagamaan di Indonesia (Sebuah Esai dalam Rangka Mengenang Almarhum Prof. Koentjaraningrat). *Antropologi Indonesia*.
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 4(2).
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 129-144.
- Rengkung, J., Makarau, V.H., & Kapugu, H. (2012). *Kajian Perubahan Bentuk Arsitektur Denah Rumah Tinggal Kaitan Dengan Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pemukim Pada Perumahan Karyawan Kantor Gubernur Di Winangun Manado. Media Matrasain*, 9(3), 33-46.
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28-41.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Sartini, S. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, 14(2), 111-120.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, (1)
- Selviyati, V. (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Pendapatan Bidang Anggaran dan Perbendaharaan DPPKAD Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah. Hal*, 1-15.

- Suprojo, A. (2019). PENGUATAN BUDAYA SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN WILAYAH. *JISIP: Jirnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 181-186.
- Sutarto, D. (2016). Kearifan budaya lokal dalam penguatan tradisi malemang di tengah masyarakat modernisasi di Sungai Keruh Musi Banyuasin Sumatera Selatan. *JURNAL DIMENSI*, 5(3).
- Utomo, S.J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10 (1)19-31.
- Warlin, I. (2014). Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Widom) Tradisi Memitu pada Masyarakat Cirebon Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(1).
- Yunus, Rasid (2013). Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 67-79.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 46 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa